



Resolusi Konflik Berbasis Teologi *Baku Bae* Ambon (1999-2002)

Burhanuddin Tidore ^{a,1}

^aFakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN A. M. Sangaji Ambon

¹Btidore66@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted: 5 July 2022

Revised: 6 September 2022

Accepted: 28 September 2022

Keywords: Conflict Resolution;
BakuBae Theology; Local
Wisdom; Peace; Religion

Kata-kata Kunci: Resolusi
Konflik; Teologi BakuBae;
Kebijaksanaan Lokal;
Perdamaian; Agama.

DOI:

<https://doi.org/10.53396/media.v3i2.111>

ABSTRACT:

This paper aims to discuss the pattern of resolution of the Ambon conflict that occurred in 1999-2002 and was caused by various complex factors. This study offers a conflict resolution approach using the so-called *BakuBae* theology, which is based on religious values and local wisdom. In this qualitative research, the author deals with the theme from the perspectives of theology, history, and culture, and uses convergence as the theme point. This study found that the dynamics of the Ambon conflict had a multi-dimensional background (political, economic, social, and cultural). The pattern of conflict resolution using a top-down approach to the security aspect, namely the role of the TNI-Polri institutions, which tend to be repressive, has caused the division of social and religious identities between Salam-Sarane (Islam-Christian) in Ambon. This actually complicates the process of ending the conflict. On the other hand, the bottom-up approach of the BakuBae social movement has involved civil society and grassroots groups that play a significant role in conflict resolution. The program of BakuBae has become the right pattern of conflict resolution. The findings of BakuBae's work are the key to a solution to the conflict in Ambon.

ABSTRAK:

Tulisan ini bertujuan untuk membahas pola penyelesaian konflik Ambon yang terjadi pada tahun 1999-2002 dan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks. Proses resolusi konflik menggunakan pendekatan Teologi BakuBae yang berbasis pada nilai-nilai religious dan kearifan lokal. Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menguraikan tema dari perspektif teologi, sejarah dan budaya, dan konvergensi sebagai titik tema. Penelitian ini menemukan bahwa dinamika konflik di Ambon memiliki latar belakang yang multi-dimensional (politik, ekonomi, sosial, budaya). Pola resolusi konflik dengan menggunakan pendekatan top down pada aspek security, yaitu peran institusi TNI-Polri yang

cenderung represif, telah menyebabkan keterpecahan identitas sosial dan keagamaan antara Salam-Sarane (Islam-Kristen) di Ambon. Hal ini justru menyulitkan proses penghentian konflik. Pada sisi lain, pendekatan bottom-up dari gerakan sosial BakuBae telah melibatkan kelompok civil society dan akar rumput yang berperan secara signifikan dalam resolusi konflik. Program bersama BakuBae yang digagas ini telah menjadi pola resolusi konflik yang tepat. Temuan hasil kerja BakuBae menjadi kunci bagi solution konflik di Ambon.

Copyright © 2022, Author



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Pendahuluan

Dalam perspektif sosiologi sejarah agama, bentuk keragaman hidup secara normatif merupakan pemberian (*given*), kepelbagaian (*diversity*) dan sebuah keniscayaan (*inevitability*) dalam tatanan hidup individu maupun kolektif di bawah sistem Ilahiyah secara praktis dan universal yang terdapat pada ras manusia sebagai makhluk beragama.¹ Hal ini menunjukkan bahwa pluralitas sosial dan nilai-nilai keyakinan dalam bingkai teologi kerukunan dan keberagaman merupakan esensi otoritas Tuhan yang menempatkan manusia hidup dalam keberagaman. Oleh karena itu, menurut Azra model teologi Islam kultural dan humanis perlu dikembangkan. Teologi tidak terbatas pada diskursus tentang Tuhan sebagai aspek yang paling sentral dari agama manapun, tetapi juga masuk ke wilayah lain. Dalam dunia muslim, diskursus teologi tidak hanya terbatas pada iman, tetapi juga masuk ke wilayah lain, misalnya teologi tanah, teologi Hasan Hanafi, teologi multikultural, teologi budaya, teologi kerukunan.²

Merujuk pada pemaknaan konteks tersebut, maka jelaslah bahwa fenomena keyakinan berteologi merupakan fakta universal yang tidak hanya ditemukan pada masyarakat muslim, tetapi juga pada agama lain dan masyarakat primitif sekalipun atau bangsa-bangsa dan suku-suku yang tidak memiliki peradaban.³ Semua manusia di dunia ini memiliki perasaan akan ketuhanan yang dapat dilihat dari cara-cara praksis dalam ritual penyembahan yang melahirkan nilai-nilai sosial aplikatif. Oleh karena itu, tujuan dasar ajaran agama (baca: Islam) adalah menciptakan perdamaian (*peace*) bagi keselamatan seluruh umat manusia yang sedang menghadapi krisis multidimensi dan tantangan global. Konstruksi damai itu berlandaskan pada esensi ajaran keagamaan yang memancarkan nilai-nilai cinta, kasih, damai, sejahtera bagi kehidupan dan penguatan ketahanan integrasi bangsa.⁴

Berangkat dari pemaparan di atas, Husein Sya'ban, seorang ulama kontemporer menyebut bahwa esensi ajaran Tuhan sebagai agama *al-Rahmah* adalah doktrin cinta kasih, yang menempatkan manusia hidup berdampingan dalam damai tanpa konflik (*non-violence*), karena hakekat manusia berasal dari satu umat, beragam Nabi dan beda agama, yang merujuk pada Q.S. al-Baqarah [2:] ayat 213.⁵ Secara teoretis gagasan al-Qur'an ini menunjukkan sejarah geneologi sosial dan komunitas Nabi terdahulu sebagai pembawa ajaran tauhid atau menganut satu landasan keyakinan berteologi. Al-Qrthubiy, misalnya

¹Fenomena ketuhanan atau ide tentang Tuhan ada dalam kajian sejarah dan mengenai asal-usul manusia (*the origin of man*) secara teologis telah membuktikan kenyataan ini. Sheed's, *Democratic Theology* (United Statet of America: Thomas Nelson Publisher, 1980), 199.

²Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia, Pengalaman Islam. Cet. I* (Jakarta: Paramadina, 1990), 29, 43. Lihat juga "Reform and Resistence in the Ques for Peace," dalam *Asian Moslem Action Network (AMAN) and Asian Resource Fondation (ARF)* (Thailand: Sam Latda Publishing, 2008), 18.

³Louis Bakhof, *Systimatic Theology* (United Statet of America: WM.B Eermands Publishing Co, 1981), 27.

⁴Jeans Jacques Waardenburg, *Muslim Kristian Preception of Dialogue Today Experiences and Expetation* (Paris: Library of Cataloging Press, 1998), 49. Bandingkan dengan Bahrul Hayat, *Mengelola Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: PT. Saada Cipta Mandiri, 2006), 167.

⁵Abdul Husein Sya'bān, *Fiqh al-Tasa>muh fi> al-Fikr al-Ara>bīy al- 'Islāmiy* (Beirut: Dār al-Nahr, 2005), 180. Lihat Q. S. al-Baqarah [2] ayat 213). "*Manusia adalah umat yang satu (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan*".

menyebut komunitas ini adalah manusia pilihan Tuhan yang hidup sejak dari zaman awal atau di era Nabi Adam A.s., Nabi Nuh A.s, hingga Nabi Ibrahim A.s, sampai pada Nabi Muhammad Saw.⁶

Landasan historis ini mengisyaratkan perlunya membangun pola hidup dan hubungan pluralitas sosial dalam bingkai struktural kesatuan atau strata sosial yang kokoh. Fazlur Rahman dalam perdebatan akademi menyebut fenomena ini dengan merujuk pada teori *double movement*⁷, yaitu tindakan atau upaya untuk mendukung gerakan kehidupan komunitas muslim dan non muslim yang plural untuk hidup lebih dinamis. Dalam konteks ini, Mahmoud Ayub yang mendukung pemikiran tersebut menyatakan terdapat tiga faktor penting sebagai landasan pluralism agama dari sistem Ilahi dan identitas komunal, yaitu: *Pertama*, kesatuan umat manusia di bawah satu Tuhan. *Kedua*, agama langit yang dibawa oleh Nabi Ulul Azmi. *Ketiga*, peranan wahyu (kitab suci) yang berfungsi untuk menyerukan dan mendamaikan konflik antarumat beragama.⁸ Olehnya itu, Durkheim menyebut keyakinan keagamaan tersebut merupakan refleksi spiritual yang terdapat dalam aksiomatika dasar struktural fungsional sebagai ciri khas manusia dalam konteks mencirikan fungsi agama untuk mengintegrasikan sistem-sistem sosial ketika terjadi konflik komunal.⁹

Bertolak dari paparan di atas, maka di dalam realitas sosial terdapat kebebasan keyakinan berteologi dengan meningkatnya frekuensi gesekan sosial atau konflik komunal antar umat beragama sebagai eksekusi dari ekspresi kebebasan yang berlebihan terhadap ajaran agama.¹⁰ Oleh karena itu, menurut Masykuri, sosialisasi ajaran agama dengan paradigma perdamaian dan kerukunan menjadi sangat penting untuk dipromosikan, karena agama pada intinya mengajarkan kebaikan, cinta bagi kedamaian hidup manusia, dan menghasilkan formula “teologi kerukunan” yang dirumuskan secara lebih aplikatif serta mudah dipahami secara bersama oleh umat dalam kerangka pembangunan sistem politik keagamaan di Indonesia.¹¹

Dalam intervensi konflik sosial, langkah strategi yang tepat menurut Hugh Mill, adalah tindakan penghentian kekerasan untuk membangun perdamaian (*peace building*). Maka diperlukan konsep yang lebih konstruktif, yaitu penanganan konflik menggunakan pendekatan terminologi resolusi konflik yang tepat dan komprehensif untuk mengetahui sumber-sumber konflik yang beragam atau kompleks.¹² Seperti, misalnya, unsur politik,

⁶ Secara historis para Nabi dan Rasul yang diutus Tuhan sesuai zaman, *situasi atau kondisi yang berbeda*. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 30.

⁷ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity About Intellectual Information*. terj. Ahsin Muhammad dengan judul, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual* (Bandung: Pustaka, 2000), 21.

⁸ Muhammad Mahmud Ayub, *The Quran and Interpreters* (New York: Al-Bany State University, 1984), 215–216.

⁹ Emile Durkheim, *The Elementary Form of Religious Life* (New York: Free Press, 1992), 81. Bandingkan juga dengan Brian Morris, dalam *Antropologi Agama, Kritik Teori-teori Agama Kontemporer*, (Yogyakarta: AK Group, 2003), 131.

¹⁰ Toha Rudin Rizal, “Gambaran Konflik Bermatras Agama di Indonesia: Problem Solving Berbasis Teologi Transformatif,” *Jurnal Studi Keislaman el-Hekam*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016.

¹¹ Mengutip pemikiran Masykuri Abdillah tentang, “Makar dan Riddah Menurut Hukum Islam: Suatu Upaya Reinterpretasi” dalam *Ahka-m. Jurnal Fakultas Syari'ah*, (UIN Jakarta No.3/11 (2000), 27, 36.

¹² Konsep Hugh Mill, mentransformasikan resolusi konflik sebagai bentuk proses yang berperan penting untuk melakukan perubahan-perubahan dan merujuk pada pola penyelesaian kedua kelompok yang sedang terlibat dalam pertikaian. Model konstruksi damai ini mengacu pada landasan normatif yaitu dominasi agama ikut berperan secara teologis di ruang publik yang majemuk menjadi kohesi sosial dalam mewujudkan damai. Hugh Miall, at.oil., *Contemporary Conflict: The Prevention Management and Transformation of Deadly Conflict*, diterjemahkan Tri Budhi

ekonomi, sosial, budaya, adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk diselesaikan, sehingga tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai dan mengakhiri konflik sosial bersenjata, terutama konflik sosial antarumat beragama tahun 1999 di Ambon yang paling mengerikan.¹³

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dalam penelitian ini penulis menawarkan konsep pendekatan resolusi konflik yang lebih solutif, yaitu model pendekatan teologis dan sosiologi-kultural secara integratif yang berbasis pada spirit gerakan *BakuBae* sebagai titik temu (*convergency*) dalam kesepahaman, bahwa konvergensi merupakan korelasi yang menjembatani kedua metodologi pendekatan, yaitu *top-down* dan *bottom-up*. Hasil rumusan dan kesepakatan tokoh agama di Malino II Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Februari 2002 menjadi titik berangkat (*common platform*) dan *source of solution* terhadap resolusi konflik yang melahirkan empat sistem nilai teologi *BakuBae*. Nilai-nilai tersebut merupakan hasil lokakarya yang panjang selama tiga tahun, yang menjadi landasan atau platform dalam upaya penghentian kekerasan konflik di Ambon. Puncaknya adalah titik temu tokoh lintas agama dalam dialog damai (*dialogue spices peaces*), baik di Ambon, di Makassar I maupun di Malino, yang dipimpin oleh JK sebagai mediator.¹⁴

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam kajian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah konflik dan model resolusi konflik di Ambon ?
2. Bagaimana bentuk nilai dasar Teologi *BakuBae* integratif bagi *Peace Building*?

Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dan bersumber dari berbagai literatur yang relevan dengan kajian tema dalam riset ini.

Sejarah Resolusi Konflik di Barat

Kalangan teoretisi sosial, seperti Quarrie, menyatakan bahwa sejarah resolusi konflik muncul pada abad kedelapan belas dan sembilan belas sebagai respon dari lahirnya gerakan sosial *dual revolution*, yaitu gerakan revolusioner dalam politik, demokratisasi dan industrialisasi di Perancis, sehingga menjadi dasar lahirnya sosiologi konflik modern atau realitas konflik kontemporer.¹⁵ Bagi sosiologi misalnya, Marx, dalam kajian resolusi konflik kontemporer menyatakan konflik menjadi isu sosial dalam dinamika sejarah kehidupan manusia. Resolusi dalam teori ilmu sosial dapat dimaknai sebagai tindakan pemecahan

Sastrio, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Monevlesakan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 30.

¹³ Gerry Van Klinken, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*. Alih bahasa oleh Bernard Hidayat dengan judul *Perang Kota Kecil Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: Obor Indonesia, 2007), 147.

¹⁴ Paul Van Tongeren, Malink Brenk, "Dialog Spices Peace: *BakuBae* In Indonesia", dalam *Peopole Building Peace II Successful Stories of Civil Society*, (Colorado USA: Lynne Rienner Publishers, Inc., 2005), 667.

¹⁵ Donald Mc Quarrie, *Reading in Contemporary Sociological Theory From Modernity to Post- Modernity*, (New Jersey: Prentce Hall, 1995), 65.

masalah atau bentuk penyelesaian masalah.¹⁶ Term konflik itu sendiri secara etimologi berasal dari bahasa latin, yaitu “*con*” yang berarti bersama, dan “*figere*” yang berarti memukul. Sedangkan terminologi konflik berarti perselisihan, benturan kepentingan, atau pertentangan untuk meraih tujuan, perbedaan nilai individu, kelompok, dan masyarakat, atau persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) dimana aspirasi pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan.¹⁷

Dengan demikian dapat dianalisis bahwa resolusi konflik adalah sebuah tindakan pemecahan atau bentuk penyelesaian masalah bersama (*solve problem together*). Kajian resolusi konflik juga dimaknai sebagai upaya mencari jalan keluar dan menangani sebab-sebab konflik dalam membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok yang berseteru atau membangun hubungan antara individu dan kelompok yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.¹⁸ Untuk mengetahui lebih jauh pemaknaan sejarah resolusi konflik, maka di bawah ini akan diuraikan beberapa teori resolusi konflik yang relevan dengan dinamika konflik sosial yang sering terjadi.

Teori-teori Resolusi Konflik

Dalam studi spesifik mengenai dinamika konflik sosial antar umat beragama, terdapat berbagai pemikiran dari kalangan teoretikus atau ilmuwan sosial. Mereka melihat faktor penyebab atau sumber-sumber konflik dari berbagai perspektif. Konflik merupakan konsekuensi logis dari berbagai problema sosial berbangsa dan bernegara yang rumit. Tidak ada bentuk penanganan konflik yang benar-benar ideal dan dapat dipergunakan untuk setiap kasus. Untuk menangani setiap konflik sosial, pengetahuan akan tipe atau bentuk konflik merupakan hal yang mendasar untuk menentukan bagaimana model penyelesaian yang tepat. Menurut Weber sebagaimana dikemukakan Talcott Parsons, setiap tindakan sosial dipengaruhi oleh sistem ideologi tertentu, budaya, norma, nilai-nilai keyakinan, motivasi dan tujuan sebagai indikator-indikator yang berbeda dalam konflik.¹⁹ Teori resolusi konflik bagi Miall adalah tindakan dan strategi penyelesaian sebagai upaya menangani penyebab terjadi gesekan sosial dan membangun komunikasi baru yang dapat bertahan lama diantara kelompok yang berkonflik.²⁰

Pakar sosiologi lain, Fisher misalnya, menggambarkan lima model pendekatan penanganan dalam teori penyelesaian konflik (*conflict resolution theory*) sosial,²¹ yaitu; pertama, pencegahan pecahnya konflik (*conflict prevention*), yaitu tindakan pencegahan

¹⁶ Stewart Levine, *Getting To Resolution: Turning Conflict Into Collaboration*, (San Fransisco: Beret Koehler Publisher Inc. 1988), 19.

¹⁷ Term konflik ini dikemukakan oleh Michael Faocault yang dikutip Naufal Kurniawan, *dalam konflik-kekerasan-dan-perdamaian.html*. Diakses tanggal 17 Oktober 2020. Lihat G. Dean Priut and Sung Hee Kim, *Social Conflict: Escalate, Stalemate and Settlement. 3rd Edition* (New York: McGraw-Hill, 2004), 10.

¹⁸ Deuth Marthon and Coleman P.T, *The Hendbook of Conflict Resolution: Theory and Practice* (San Fransisco: John Wiley & Sons Inc. 2002), 197. Lihat Simon Fisher, et.all., *Working With Conflict: Skill abd Strategies for Action* (New York-USA: Zed Boos Ltd, 2000). Terj. S.N. Kartikasari, *Mengelola Konflik Ketrampilan dan Strategi untu Bertindak*, (Jakarta: The British Council Indonesia, 2001), 4

¹⁹ Peter Hailton, *Talcott Parsons dan Pemikirannya*. trj. Hartono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990).

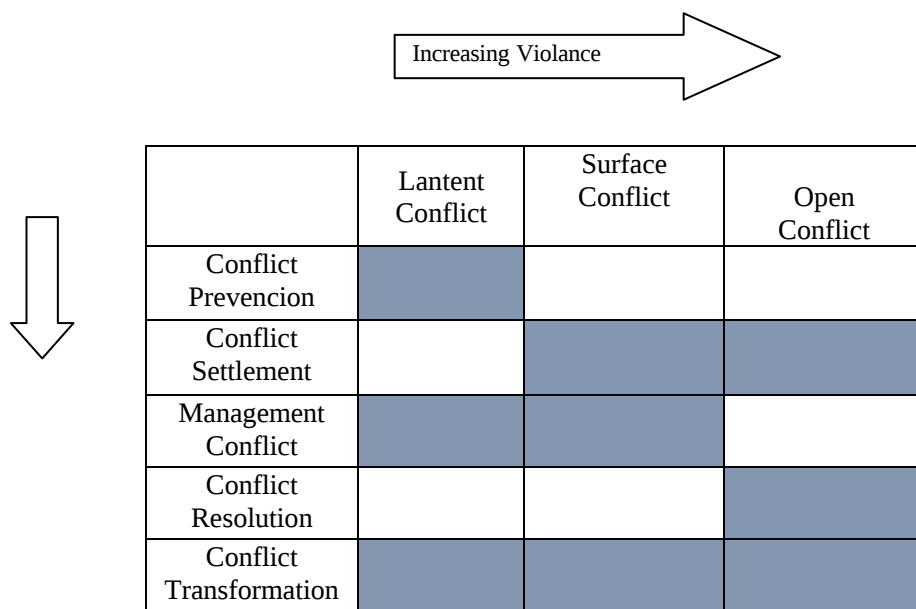
²⁰ Tri Budhi Satrio, *Resolusi Konflik Kontenporer, Menyelsaikan, Mencegah, Mengelola, Konflik Bersumber Politik Sosial, Agama dan Ras*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers ada, 2002), 103.

²¹ Pandangan Fisher ini dikutip oleh M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Membangun Damai*, (Semarang: Walisongo Media Centre, 2007), 14.

konflik kekerasan (*violence conflict*); kedua, penanganan konflik (*conflict settlement*), yaitu berupaya untuk mengakhiri tingkah laku kekerasan dengan mencapai kesepakatan perdamaian; *ketiga*, manajemen konflik (*conflict management*) bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan yang mungkin terjadi di waktu mendatang dengan cara mendukung perubahan tingkah laku positif pada pihak-pihak yang terlibat; *keempat*, resolusi konflik (*conflict resolution*) membahas berbagai penyebab konflik dan mencoba untuk membangun hubungan baru dan abadi diantara kelompok-kelompok yang saling bermusuhan; *kelima*, transformasi konflik (*conflict transformation*) membahas sumber politik dan sosial yang lebih luas dan berusaha mengubah energi negatif peperangan menjadi perubahan sosial politik dan bersifat positif.²²

Di sisi lain, pendekatan membangun keharmonisan hidup umat beragama pada umumnya bersumber dari banyak perspektif atau kajian teoretis dari para ahli teologi maupun sosiologi agama. Hal ini menjadi landasan utama bagi upaya membangun ikatan sosial yang kuat, walaupun sering terjadi perdebatan mengenai konflik kekerasan horizontal atau vertikal di beberapa tempat, misalnya di Ambon. Namun konsep strategi yang dianggap relevan dalam membangun harmonisasi sosial dan perdamaian adalah model mekanisme pendekatan resolusi konflik.²³ Bagan berikut ini menggambarkan penjelasan kalimat pendekatan tersebut.

Gambar 1: Bagan terminologi berbagai respon terhadap konflik oleh Simon Fisher, Dekha Ibrahim, dan Richard Smith.



²³Pendekatan ini cukup tepat, karena sifat dasar umum kehidupan sosial keagamaan di Indonesia, yaitu mudah menerima dan terbuka bagi pandangan baru, rekonsiliasi dan konstruksi jembatan perdamaian. Daniel S. Lev, *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*, (The Hague: Kluwer Law International, 2000), 187.

Pada sisi lain, Mukhsin Jamil dalam perspektifnya membagi konflik ke dalam empat tipe konflik,²⁴ yaitu:

- a. Kondisi tanpa konflik (*No Conflict*). Menurut persepsi orang pada umumnya, tanpa konflik merupakan kondisi aman yang diinginkan oleh setiap orang. Namun demikian bagi komunitas atau kelompok masyarakat yang damai, jika ingin bertahan lama agar hidup harmonis dan dinamis, maka kita perlu mengelola konflik dan menyelesaikan konflik secara kreatif.
- b. Konflik laten (*latent conflict*). Konflik laten adalah konflik yang berada di bawah permukaan dan untuk menyelesaikan secara efektif maka konflik ini perlu dibawa ke permukaan.
- c. Konflik permukaan (*surface conflict*). Konflik ini memiliki akar yang tidak dalam atau tidak mengakar, bahwa konflik permukaan ini muncul akibat dari kesalahpahaman mengenai sasaran dan dapat diatasi dengan perbaikan komunikasi.
- d. Konflik terbuka (*open conflict*). Konflik ini mengakar secara dalam serta tampak jelas, dan membutuhkan tindakan untuk mengatasi penyebab yang mengakar serta efek yang tampak.

Berbagai kekerasan sosial di Indonesia sering terjadi, misalnya konflik di Ambon yang pecah pada tanggal 19 Januari 1999, telah menghancurkan seluruh sendi kehidupan. Maka diperlukan intervensi resolusi konflik yang melibatkan berbagai elemen sosial, baik lembaga-lembaga sosial, maupun lembaga pemerintah atau Negara sebagai negosiator dan eksekutor. Berbagai pola pendekatan dilakukan seperti penyelesaian dengan cara koersif (pemaksaan) dan bersifat *top down approach* yang bertujuan untuk menghentikan eskalasi konflik atau damai secara paksa. Sedangkan ketegangan non-koersif, yakni dengan cara menolak pemaksaan untuk menghasilkan kesepakatan atau kompromi bersifat *bottom-up approach*.²⁵ Dalam konteks ini, berdamai secara paksa hanya muncul dipermukaan sebagai simbol, tetapi secara laten konflik itu sewaktu-waktu tetap muncul dan menimbulkan kelompok pro dan oposisi, sehingga konflik itu sulit untuk dapat diselesaikan.²⁶ Oleh karena itu, diperlukan strategi penyelesaian konflik model *peace building*. Strategi ini menawarkan metode membangun perdamaian dan mengakhiri konflik dengan tiga cara yaitu; menghindari, menaklukkan, dan mengakhiri konflik sesuai prosedur. Sedangkan model *peace making*, tindakan resolusi untuk membuat strategi atau pola bagaimana perdamaian itu bisa tercipta untuk mengakhiri konflik.²⁷

Ketiga metode atau cara tersebut memperhatikan faktor kepentingan (*interest*), kekuasaan (*power*), dan hak (*right*), yang menjadi sumber konflik antara dua pihak. Dan kepentingan adalah objek kebutuhan atau keinginan yang menjadi sumber konflik. Artinya

²⁴ Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, (Semarang: Walisongo Mediate Centre, 2007), 15.

²⁵ Yun Kim, dan Gudykunst, *Communicating with Stranger An Approach to Interpersonal Communcation*, (McGraw Hill: Sage Publication, 1997), 282.

²⁶ Rauf Maswardi, *Konsesus dan Konflik Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2011), 11-12.

²⁷ Florian Pohl, "Integrelegius Harmony and Peacebuilding in Indonesia" dalam *Christina Jayme Montiel, Noraini M. Noor, ed., Peace Psichology in Asia*, (New York USA: Springer Library of Congress, 2009), 147. Lihat William Kornblurn, *Sociologi in The Changing World 6 th. ed.* (USA: Wardsmoth/Thompson Learning, 2003), 294.

dua pihak punya kebutuhan dan keinginan untuk memperoleh status dan peran sehingga memiliki hak dan kewenangan tertentu yang dominan. Dalam arti bahwa kedua pihak punya kebutuhan dan keinginan untuk memperoleh tuntutannya, karena masing-masing merasa bahwa tuntutan itu berkaitan dengan kewenangan, kekuasaan dan tanggung jawab. Model ini mengisyaratkan bahwa satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik adalah memenuhi kebutuhan semua pihak yang bersengketa, kepentingan, kekuasaan dan hak pada saat konflik atau pasca konflik tetap menjadi prioritas perhatian pemerintah atau negara untuk dituntaskan.²⁸

Berdasarkan pemaparan model intervensi ketiga pihak di atas, terdapat beberapa pola yang saling interaksi, yaitu; *coercion*, arbitrase, dan mediasi. *Coercion* adalah model penyelesaian konflik dengan paksaan, di mana masing-masing pihak dipaksa untuk mengakhiri konflik. Arbitrase adalah penyelesaian konflik dengan mengambil pihak ketiga untuk memutuskan masalah yang terjadi dan keputusan itu harus dipatuhi oleh masing-masing pihak. Sedangkan mediasi berarti pihak ketiga hanya berfungsi untuk menjembatani penyelesaian konflik secara komprehensif.²⁹ Beberapa model resolusi konflik akan dijelaskan berikut ini:

Resolusi Konflik dalam Islam

Bukti-bukti empiris tentang konstruksi sejarah resolusi konflik sosial yang dibangun melalui praktek toleransi dalam Islam seperti, misalnya, perdebatan antara kaum kafir yang menolak dakwah Nabi Saw. Namun tindakan kaum kafir itu disikapi oleh beliau Saw, dengan akhlak pemurah dan kesalehan etika. Inilah sifat yang bijaksana (*al-Mauizah*) dan kemampuan makrifat atau religius-spiritual dan intelektual Ilahiyah yang spesifik yang dimiliki oleh Nabi. Pada akhirnya konfrontasi dalam sejarah perdebatan itu berubah menjadi jembatan dialog transformatif yang berlandaskan cinta, kasih (*al-rahmah*) yang berbasis etika yang mulia (*al-Akhlaq al-Karimah*) ke praktis-humanis yang elegan dari kemuliaan akhlak Nabi Saw. Walaupun hal itu dilakukan dihadapan kaum kafir dan musuh sekalipun, atau komunitas agama lain tanpa intimidasi dan paksaan.³⁰ Sejarah juga mencatat bahwa ketika pernah terjadi gesekan sosial konflik, penolakan, dan intimidasi yang datang dari kelompok oposisi *kaum Quraisy*, yaitu ancaman dan tindakan fisik kepada Nabi, tetapi beliau tetap membalas dengan senyum sebagai refleksi akhlak mulia atau tindakan terpuji. Bahkan beliau masih berdoa agar kaumnya memperoleh hidayah-petunjuk dari Allah SWT.

Dalam hal menyelesaikan konflik sosial, Islam sangat menjunjung upaya perdamaian dengan cara musyawarah di atas landasan *bil-Hikmah wa al-Mauzah al-Hasanah* atau dengan bijaksana dan cara yang baik. Ini adalah doktrin pendekatan ajaran Islam tentang musyawarah yang di dalamnya terdapat unsur mediasi dan negosiasi. Hal ini didasarkan pada waktu bahwa dalam konflik sering dijumpai pihak yang bertikai mengalami jalan buntu dalam menghadapi problem sosial utama penyelesaian konflik.³¹ Di sinilah Islam mengajarkan bagaimana peran mediator diperlukan dan hal ini, misalnya dapat diketahui

²⁸ Ho-Won Joeng, *Peace and Conflict Studies: An Introduction* (England: Asghate Publishing Company, 2003), 24.

²⁹ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), 343.

³⁰ Ibnu Mujib, Yance Z. Rumahuru, *Paradigma Transformatif Masyarakat Dialog Membangun Fondasi Dialog Agama-Agama Berbasis Teologi Humanis*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 132.

melalui petunjuk Q.S. al-Hujarat [49] ayat 10, yang menegaskan sikap dan peran mediator harus netral saat mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi atau *takhim* berarti menyerahkan putusan pada seseorang yang berfungsi menjadi *top leader* dan menerima putusan tersebut bagi jalan tawaran yang lebih solutif di dalam membangun kerukunan dan menyelesaikan berbagai problem konflik sosial. Hal ini relevan dengan himbauan al-Qur'an Surat al-Hujarat [49] ayat 10:

أَلَيْمَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Pada sisi lain, apabila terjadi perselisihan maka diperlukan peran mediator yang dapat menengahi dan mendamaikan antara kelompok sosial yang bertikai.³² Dalam konteks ini Q.S. Al- Hujarat [49] ayat 9 menegaskan:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاعِثَ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin, damailah keduanya. Jika dari satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali telah kembali kepada perintah Allah, damailah keduanya dengan bersikap adil. Bersikaplah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

Dalam ajaran Islam upaya mendamaikan pihak yang bertikai dinilai oleh Allah Swt. sebagai ibadah. Namun tidak dianjurkan untuk melakukan paksaan atau tindakan represif atau koersif dalam mencapai kesepakatan. Penyelesaian konflik mencakup kesetaraan, kebebasan dan keadilan yang dapat disepakati melalui proses negosiasi.³³ Oleh karena itu, ajaran mengenai perdamaian terkait dengan pluralisme kebudayaan dan keagamaan tertuang dalam Al-Qur'an sebagai rujukan. Kesadaran akan perbedaan dan pentingnya kedamaian seharusnya dapat mengikis tindakan kekerasan dalam masyarakat seperti pengalaman konflik sosial di Indonesia. Islam memberikan landasan mengenai perdamaian nir-kekerasan jauh lebih baik dari pada kekerasan, hal ini tertuang dalam Al-Qur'an antara lain mengenai nilai keadilan ('adl), kebaikan (ihsan), kasih (rahmah), persaudaraan (ikhwah), dan kebijaksanaan (hikmah).³⁴

Dengan demikian dapat dinalisis bahwa konsep persaudaraan menjadi basis utama yang melandasi ajaran Islam, dan bersumber dari Hadits Nabi Saw, sebagaimana yang diriwayatkan Jarir bin Abdullah r.a. bahwa Rasulullah bersabda; "Barang siapa tidak

³² Abu Nimer, *Non-Violence and Fostering Peace in Islam: Theory and Practice*, trj. Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam: Teori dan Praktik, terj. (Jakarta: Pusakan Alvabeth, 2010), 140.

³³ Salam Mazkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1993), 19-20.

³⁴ Ashgar Ali Engineer, Mahendra, eds., "*Sources Of Nonviolence in Islam*" *Nonviolence Contemporary Issues and Challenges*, (New Delhi: Gandhi Peace Foundation, 1994), 106.

mengasihi sesama manusia, maka ia tidak dikasihi Allah Swt.”³⁵

Resolusi Konflik Model Teologi BakuBae di Ambon

Konsep teologi BakuBae dalam resolusi konflik menurut Malik menunjukkan bahwa rumusan mengenai prinsip nilai-nilai keagamaan dan budaya menjadi sebuah konsep yang integratif. Di dalam norma atau nilai-nilai tersebut terdapat kearifan lokal yang khas bagi orang Ambon- Maluku sendiri, seperti prinsip hidup “kekitaan” atau hidup rukun dalam persaudaraan, atau *katong samua orang basudara, satu pela-satu gandong, ale rasa beta rasa*, potong di kuku rasa di daging, untuk saling baku sayang. Bingkai kearifan lokal dalam kekerabatan ini terdapat pada masing-masing ajaran agama di Ambon yang melahirkan sikap hidup untuk saling membantu, gotong-royong (*masohi*) antar negeri, seperti membangun Masjid, gereja, rumah adat (Baeleo), yang dilakukan secara bersama tanpa melihat latar belakang budaya maupun agama yang dipeluk.³⁶

Budaya yang khas atau kekerabatan ini telah ada sejak nenek moyang, dan tertanam dalam hati sanubari orang Ambon-Maluku. Masyarakat menginginkan rasa aman yang telah direnggut oleh konflik dapat segera terwujud kembali. Jadi tugas kita secara empiris hanya menggali, merangkai, serta menarasikan kembali kearifan lokal tersebut agar relevan dengan proses menyelesaikan konflik yang terjadi, khususnya di Ambon-Maluku. Teologi *BakuBae* ini menjadi perekat yang solutif karena dapat dirasakan, dikenali, dan dapat dipahami oleh orang Ambon dan Maluku itu sendiri secara keseluruhan. Peran dari gerakan *BakuBae* menurut Malik, memberikan kontribusi yang signifikan dan bernilai sebagai parameter, sehingga kalau dikalkulasi secara matematik, maka prosentasinya BakuBae 25 %, peran pemerintah 25 %, institusi TNI-Polri 25 %, Lembaga keagamaan, kelompok *civil society*, LSM, dan jurnalis 25 %.³⁷

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pendekatan teologi dalam gerakan damai *bottom-up* telah berperan secara maksimal dan fokus pada dialog atau berbicara dari hati ke hati, maupun di forum debat segi tiga di Malino. Tujuan utama adalah upaya mendekatkan yang jauh, merangkul yang putus, dan menyatukan kembali keretakan masyarakat yang sudah terbelah total akibat konflik, sehingga kembali menjadi *katong samua basudara* (kita semua orang bersaudara). Dasar ideologi keagamaan atau teori agama kemanusiaan dalam konteks budaya lokal dapat menjadi perekat bagi konstruksi *BakuBae*. Kata yang sinonim ini bersumber dari dunia anak-anak di Ambon-Maluku, ketika dua anak kecil berkelahi. Setelah reda mereka saling merangkul dengan bahasa kearifan yang khas dan mengatakan *katong dua BakuBae*, sambil saling menempelkan jempol masing-masing. Kata *BakuBae* ini mempresentasikan ilham/insight *a-ha* dari Lebniz. Kata ini telah membuka ruang yang seluas-luasnya untuk proses perdamaian di Ambon-Maluku. Ruang politik, agama, dan keamanan yang terisolasi selama konflik mengalami kemacetan karena isu agama dan politik segera dibuka.

³⁵ Al-Hafiz Nur al-Di>n Ali Ibn Bar> al-Haitamiy, *Majmu' al-Zawa>' id wa Manba'ul Fawa>'id*, Vol. 8 (Beirut: Da>r Al-Fikr, 1412 H/1992), 116.

³⁶ Ichsan Malik, “*Mekanisme Gerakan BakuBae dan Kearifan dalam Rekonsiliasi*”, dalam Karel Albert Ralahu, *Beralayar Dalam Ombak, Berkarya Bagi Negeri: Pemikiran Anak Negeri Untuk Maluku*, (Ambon: Ralahu Institut, 2012), 299, 303.

³⁷ Ichsan Malik, “Wawancara”, tanggal 17 Desember 2019, di Bogor.

Temuan ruang budaya (*local wisdom*) menjadi peluang bagi proses *Bakudapa* dan konstruksi *BakuBae* berjalan secara mengalir, mulus, dan efektif. Pada akhirnya temuan riset ini menunjukkan gerakan *BakuBae* merupakan transformasi nilai-nilai keyakinan yang melahirkan simbol gerakan berupa gambar “dua jempol” yang melekat ditempelkan sebagai simbol perbedaan teologi. Namun, *BakuBae* tetap survive menjadi lebih fokus dan permanen, seperti juga dua ekor burung merpati terbang merangkai bunga, sebagai simbol perdamaian abadi. Perasaan kebersamaan untuk saling *BakuBae* memberikan harapan hidup baru bersama yang sudah mulai hilang disebabkan konflik, dan membangkitkan rasa saling percaya (*trust*) untuk menumbuhkan kembali rasa empati sebagai sesama anak negeri orang basudara, pela, gandong, di Ambon-Maluku. Gerakan *bottom-up* dalam resolusi dan konstruksi *BakuBae* dapat diibaratkan dengan mempersiapkan semua bahan-bahan dasar untuk masakan yang kemudian dimasak dan dihidangkan oleh Negara saat di meja perundingan atau perdebatan publik, pada tanggal 11-12 Februari 2002 di Malino Sulawesi Selatan (dikenal dengan Malino II).

Prinsip Dasar Teologi *BakuBae* Integratif dalam Konteks *Peace Building*

Wacana *peace building* di kemudian hari menyita perhatian para sosiolog sebagai pemerhati resolusi konflik maupun kaum agamawan. Hal ini diakibatkan problem kekerasan dan konflik komunal yang melanda masyarakat dunia pada umumnya bernuansa politik, ekonomi, budaya, yang menggiring agama sebagai faktor pemicu. Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak akan lenyap dari sejarah. Selama kita masih hidup tidak mungkin menghapus konflik dari kehidupan dunia ini.³⁸

John Paul Lederach, dengan kerangka teori *a framework for building peace*, yaitu sebuah kerangka membangun perdamaian, yang mencoba membeberkan bukti dan argumen bahwa nilai-nilai teologis dalam tradisi agama-agama besar di dunia, sesungguhnya masih berpotensi menawarkan pandangan dan petunjuk yang sangat kaya dalam menyerukan kedamaian (*peace*) ini.³⁹ Gagasan senada juga dikemukakan komunitas akademi lain, misalnya, Paul Van Tongeren dan Marlin Brenk, yang secara teoretis membedah konflik yang berbasis pada kerangka *dialogue spices peace: Baku Bae in Indonesia*, dan berusaha merekonstruksi tujuan strategi penghentian kekerasan konflik di Indonesia, pada kasus Ambon, menuju *Baku Bae*.⁴⁰ Model penyelesaian konflik yang dibangun oleh kedua sosiolog konflik di atas secara bertahap dimulai dari proses *making peace*, yaitu; tindakan dalam mediasi, negosiasi, dan konsolidasi, dan *peace building* sebagai kerangka dasar atau landasan bagi penghentian kekerasan konflik dan menghadapi penyelesaian konflik. Masyarakat sipil diperbesar ruang geraknya, sehingga mampu untuk mengendalikan momentum resolusi serta didukung oleh teritorial wilayah konflik.⁴¹

Langkah-langkah kegiatan dalam tujuan strategi penghentian kekerasan ini terinspirasi oleh kerangka teori *making peace* yang dibuat dan dikembangkan oleh Adam

³⁸ Prajoto Dirjosanjoto Nugroho Nilol?, *Kana, Konflik dan Kekerasan Pada Atas Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), xxii.

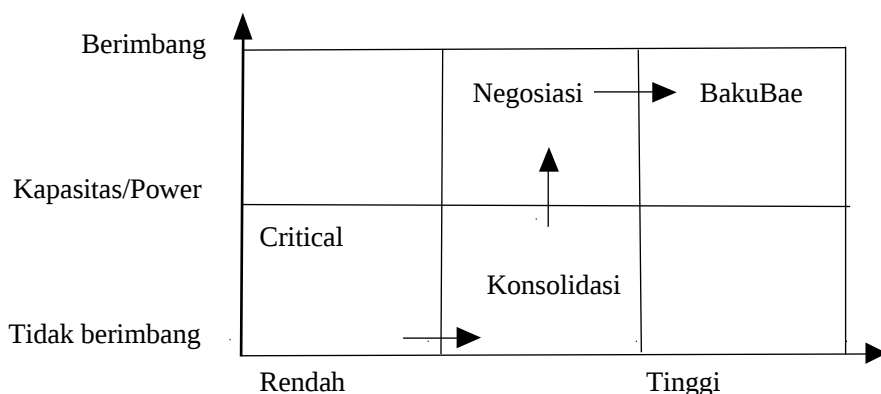
³⁹ John Paul Lederach, “*A Framework for Building Peace*” dalam *Perparing for Peace Conflict Transformation Across Culture*, (New York: Syracuse University Press, 1995), 11.

⁴⁰ Paul Van Tongeren dan Malin Brenk, *People Building Peace II Successfull Stories of Civil Society*, (London: Lyne Rienner Publisher, 2005), 395-396.

⁴¹ Ichsan Malik, *Gerakan dari Akar Rumput Untuk Menghentikan Kekerasan di Maluku*, (Jakarta: Tifa, 200), 11.

Curley pada tahun 1971, tentang pola atau metode bagaimana menciptakan perdamaian dalam resolusi konflik.⁴² Namun gerakan *BakuBae* melakukan modifikasi sesuai dengan realitas dan situasi dalam konteks konflik Ambon-Maluku. Dari berbagai hasil penelusuran dapat ditemukan tiga sistem nilai dasar prinsip teologi *BakuBae* yang relevan dengan konteks kehidupan umat beragama di Ambon pasca perjanjian Malino II, dan implementasi secara berkelanjutan, seperti prinsip dialog, prinsip persaudaraan lintas sosial/kemanusiaan, dan prinsip toleransi. Di samping itu terdapat beberapa model atau tujuan strategi gerakan resolusi konflik *BakuBae* untuk penghentian kekerasan dan *peace building*. Lebih jauh dapat dilihat pada gambar atau table di bawah ini.

Gambar 2: Grafik penyelesaian konflik model *BakuBae* Ambon-Maluku.



Gambar di atas menjelaskan bahwa langkah penghentian kekerasan yang dipelopori oleh masyarakat korban dan pelaku konflik mungkin dilakukan apabila ada kesadaran dari masyarakat akan sumber konflik dan strategi untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik. Di sisi lain, kelompok masyarakat sipil telah memiliki kapasitas untuk menghadapi dan mengelola konflik. Proses mediasi untuk membangun kesadaran kritis dan kapasitas adalah lokakarya kritis dan mengorganisir kelompok sosial untuk menghentikan konflik kekerasan. Cara atau proses ini dapat dilaksanakan setelah lokakarya bagi masyarakat yang telah sadar konflik serta memiliki kapasitas yang berimbang tanpa didominasi oleh salah satu pihak. Apabila semua proses itu telah berjalan, maka gerakan *BakuBae* dapat mewujudkan kehidupan masyarakat sipil bisa *survive* kembali pasca konflik.

Tujuan strategi kedua *BakuBae* adalah “pemberdayaan ekonomi makro bagi kalangan sosial kecil, pembenahan pendidikan dasar, penyediaan sarana kesehatan minimal, dan penyediaan sarana informasi dan komunikasi rakyat.” Dalam konteks ini, sasaran utama adalah pengungsi, masyarakat adat, anak-anak dan ibu-ibu korban langsung dari dampak konflik Ambon. Namun tujuan strategi kedua ini hanya mungkin dilakukan apabila ada kesepakatan tuntas dari para korban dan pelaku konflik untuk menghentikan kekerasan di Ambon dan merajut kembali secara bersama masa depan di Maluku.

⁴² John Paul Lederach, *Building Peace Sustainable Reconciliation in Divided Societies*, (Washington: United State Institute of Peace Studie, 1998) 65.

Tujuan *staregi* ketiga *BakuBae*, adalah “penegakan hukum”. Point ini bisa terwujud setelah kegiatan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan berjalan secara optimal. Kegiatan utama yang dirancang dalam tujuan strategi ketiga ini meliputi pelaksanaan investigasi untuk membongkar sebab atau akar konflik Maluku, proses hukum atau pelaksanaan pengadilan bagi pelaku yang terbukti bersalah sebagai aktor atau pendesain konflik. Lokakarya pendidikan hukum kritis bagi masyarakat dapat dipandang sebagai langkah pencegahan bagi terulangnya konflik, serta bertujuan untuk merancang kebijakan hukum (*legal drafting*) untuk kompensasi bagi korban konflik dan pencegahan konflik secara mendasar.⁴³

Meskipun keduanya menyadari terdapat kendala, terutama pada dunia sekuler Barat, yaitu soal bagaimana membawa ajaran-ajaran damai yang diajarkan agama (teologi) ke dalam agenda politik secara konstruktif dan praktis. Karena itu, kecenderungan politik komunal keagamaan membuat para pemimpin agama-agama cenderung untuk menimbang kembali kebijakan-kebijakan dalam sistem politik mereka sehingga dalam studi ilmu sosiologi di luar sejarah, antara komunalisme sosial dan keagamaan tersebut tidak mengancam keutuhan dan eksistensi sebuah komunitas, yang dalam istilah Azra disebut “sejarah interpretatif.”⁴⁴

Seperti gagasan Durkheim, yang dikutip Carter dan Smith, simbol-simbol keagamaan merupakan representasi masyarakat, tidak lebih dan tidak kurang. Baginya, tantangan ideologi keagamaan masa kini meliputi tiga hal, yaitu: pertama, upaya memahami secara jelas doktrin teologi atau ajaran agama-agama memasuki ruang-ruang *dialog peace building*, yang dapat menyatukan komunitas sosial dalam berbagai episode konflik tertentu, hubungannya dengan faktor-faktor penyebab konflik kekerasan lainnya. Kedua, konflik-konflik abad 21 telah semakin kompleks, sekaligus menakutkan semua orang, maka diperlukan suatu pencegahan efektif dan resolusi sebagai metode bagaimana menangani konflik itu bagi konstruksi perdamaian. Ketiga, adalah bagaimana mengintegrasikan spirit damai, dan tradisi-tradisi (*local wisdom*), yang berbasis keagamaan ke dalam dunia politik serta manajemen resolusi, dan pencegahan konflik.⁴⁵

Dalam konteks ini menurut beberapa informan kunci tokoh keagamaan telah melakukan interaksi cukup intensif di dalam proses membangun perdamaian pada saat konflik di Ambon. Penulis mencoba mengungkap kerangka pemikiran dan peran penting para tokoh lintas agama atau teologis dalam melihat konflik itu, baik penanganan, tindakan penghentian, dan analisis dalam proses penyelesaian di Ambon. Dalam arti kata, menggali pemikiran mereka yang berbasis pada cara pandang yang berbeda-beda dalam melihat pentingnya peran agama di ruang publik dapat menjadi kunci penyelesaian konflik. Oleh karena ajaran damai dapat menjadi landasan utama di dalam kehidupan umat beragama, dan kunci penghentian kekerasan, maupun proses resolusi konflik. Senada dengan konsep tersebut, penegasan Imam Besar Masjid Raya Al-Fatah Ambon, dan mantan ketua MUI Maluku periode 1987- 2002, H. R.R Hasanussi, berikut ini:

⁴³ Ichsan Malik, *BakuBae Gerakan dari Akar Rumput Untuk Penghentian Kekerasan Konflik di Maluku*, (Jakarta: Tifa, 2003), 12.

⁴⁴ Azyumardi Azra, *Histografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas dan Aktor Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 160.

⁴⁵ Carter Judy dan Gordon Smith, *Religious Peacebuilding*,: From Potensial to Action. 280.

Pada saat awal pecah konflik di Ambon tanggal 19 Januari 1999, sebagai ketua MUI Maluku, saya serukan pada umat Islam agar tetap menahan diri, tidak panik, tidak terprofokasi, dan tidak bersikap sporadis. Secara tegas saya menyatakan agar pemerintah segera bertindak menghentikan konflik, menyelesaikan konflik dan konsekuen dalam penegakan hukum, dengan mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan. Dalam Islam di ajarkan bagaimana seorang muslim berusaha menciptakan keamanan, kedamaian, dan ketertiban (kamtibmas), baik terhadap lingkungannya, maupun antara sesama warga. Sebagai muslim harus mencontohi akhlak Nabi Saw., ketika beliau dicaci maki, dilempari kotoran, beliau tetap mendo'akan kaum kafir itu. Inilah model etika toleransi dalam sejarah Islam, yang patut dicontohi umat muslim. Tetapi hukum dan keadilan juga harus ditegakkan. Sehingga itu, sosialisasi 11 butir hasil kesepakatan Malino untuk menghentikan konflik, tetap dipatuhi secara bersama oleh ke dua komunitas, baik Islam dan Kristen di Ambon.⁴⁶

Sejalan dengan pandangan di atas, pimpinan Gereja Katolik Keuskupan Amboina, Uskup Petrus Canisius Mandagi, banyak memberi kontribusi pemikiran solutif terhadap penghentian kekerasan konflik di Ambon, yaitu seruan terpadu secara damai dengan pendekatan agama. Mandagi pernah melakukan aksi politik melalui Crisis Center. Misalnya, yang ditulis oleh C.J. Bohm,⁴⁷ Uskup Mandagi pernah mengirim telegram *urgen appeal* (seruan mendesak) ke publik internasional di Vatikan dan beberapa lembaga Negara, baik instansi lokal, maupun nasional atas kekhawatiran akibat konflik Ambon yang masif. Tujuannya adalah memohon intervensi PBB untuk menghentikan kekerasan sosial konflik, pertikaian, pembantaian, yang sedang berlangsung, dan membantu proses perdamaian di Ambon Maluku, karena Negara terkesan bertindak sangat lambat melakukan pencegahan. Lebih jauh P.C. Mandagi menyatakan:

Seerti juga agama-agama lain, di dalam ajaran Katolik, perdamaian hakiki adalah membangun relasi vertikal yang baik kepada Tuhan dan horisontal antar sesama manusia. Ketika ia damai dengan Tuhan, maka pasti ia akan damai juga dengan sesama umat manusia. Sebagai pimpinan umat Katolik, sejak awal konflik tahun 1999, saya lakukan *urgen appeal* kepada semua instistusi keagamaan, baik di Ambon maupun di Jakarta dan dunia untuk melakukan aksi sosialisai damai dan menghentikan konflik. Semua agama mengajarkan damai, kasih, sayang, sejahtera bagi seluruh umat manusia.⁴⁸

Namun terkadang kita tidak memahami ajaran agama dengan baik, lagi-lagi tanpa sadar mengikuti hawa nafsu yang tinggi dan keserakahan, sehingga berdampak buruk terhadap citra dari masing-masing umat beragama. Dengan beragama yang baik, dan berusaha memahami inti dari ajaran agama masing-masing secara sungguh-sungguh, niscaya mejauhkan kita semua dari prejudice dan segala pertikaian atau konflik.

Terminologi *BakuBae*

Terminologi *BakuBae* dalam konteks bahasa ‘tanah’ atau bahasa lokal di Ambon berasal dari dua suku kata yang berbeda, atau konotasi pengertiannya tidak sama, tetapi mengandung nilai filosofi yang amat dalam. *BakuBae* adalah istilah yang berasal dari masyarakat Ambon-Maluku itu sendiri,⁴⁹ yaitu, dari kata: *baku* yang berarti ‘ajak, panggil, rangkul, atau mengajak’, dan *bae* bermakna ‘baik, aman, atau damai. Di dalamnya tersirat

⁴⁶ H. R. Hassanusi, Mantan Kaditbintal Polda Maluku, dan Imam Masjid Raya Al-Fatah Ambon, “Wawancara”, 02 Januari 2020, di Ambon.

⁴⁷ C.J. Bohm, *Beref of The Unrets in The Maluccas 1999-2003*. Diterjemahkan Tim Keuskupan Amboina, *Lintas Peristiwa Kerusuhan di Maluku 1999-2003*, (Ambon: Crisis Center Diocese of Amboina, 2003), 31.

⁴⁸ P.C. Mandagi, Ketua Keuskupan Katolik Amboina, “Wawancara”, tanggal 25 Januari 2020, di Ambon.

⁴⁹ Hasbollah Toisuta, akademisi, delegasi di Malino II, “Wawancara”, tanggal 17 Januari 2020, di Ambon.

pesan moral-teologis. Jadi secara terminologis, *BakuBae* menunjuk pada upaya berbaikan, berdamai, yaitu suatu bentuk penyelesaian masalah atau konflik berbasis budaya.⁵⁰ Namun dalam konteks konflik di Ambon *BakuBae* memiliki pengertian yang lebih luas dan plural, yakni gerakan masyarakat sipil untuk menghentikan kekerasan konflik di Ambon sehingga menjadi damai positif, kalau melanggar berakibat “mati”.⁵¹

Istilah *Bakudapa* dan *BakuBae* lahir dari manifestasi sebuah kesadaran orang Ambon sendiri untuk menyelesaikan masalah di antara pihak-pihak yang pernah bertikai atau bermasalah (*bakalae*). Maka *Bakudapa* dan *BakuBae* dapat disebutkan sebagai bentuk musyawarah untuk penyelesaian konflik berbasis agama dan budaya, atau berlandaskan pada religiositas dan kearifan lokal. Misalnya, *Pela-Gandong* bisa dipakai sebagai instrument pengikat yang khas (*the local wisdom*), untuk merakit kembali relasi-relasi agama yang telah lama dikenal oleh masyarakat di Ambon, yang telah hancur akibat konflik.⁵² Dalam konteks resolusi konflik secara umum, *BakuBae* dapat disamakan dengan dialog antara dua orang atau kelompok *Salam-Sarane* yang berbeda perspektif. Kata *Bakudapa* juga merupakan syarat utama untuk membangun relasi sosial yang dialogis dan dinamis, sekaligus sebagai mediasi untuk mengelola dan meminimalisir pertikaian agar tidak meluas. Singkatnya, *BakuBae* merupakan lanjutan dari langkah awal *Bakudapa* dan strategi dalam proses *peace movement* bagi penyelesaian konflik kekerasan di Ambon.⁵³

Patut dijelaskan bahwa *Bakudapa* dan *BakuBae* telah menjadi bagian integral dari kultur kehidupan orang Ambon-Maluku. Dalam dinamika sosial konflik, misalnya, ketika seseorang melakukan kesalahan, tindakan atau kekerasan pada pihak lain, maka secara spontan keduanya kembali saling memaaf (*BakuBae*). Pada kasus konflik Ambon tahun 1999-2001, terdapat insiatif dari *stakeholder* maupun dari kalangan masyarakat sipil dalam gerakan sosial moderat melakukan aksi nyata dalam upaya konstruksi perdamaian. Aksi nyata kalangan *peace community* ini sebagai mediator yang berproses dan bekerja untuk menciptakan mekanisme *Bakudapa* dalam gerakan *BakuBae* di Ambon. Singkatnya, *BakuBae* adalah spirit yang lahir dari hati nurani (*heart*, al-qalb, batiniyah), yaitu sebuah kekhasan manusia Maluku untuk berdamai (*ishlah*) yang lebih permanen bagi komunitas masyarakat Salam dan Sarane secara lebih umum di Ambon.

Dalam konteks ini, M. Noer Tawaenella, seorang budayawan lokal yang banyak mengetahui sejarah sosio-kultural dan antropologi asal-usul manusia di Ambon-Maluku, , menjelaskan:

Kata atau istilah *BakuBae* tetap mengacu pada nilai-nilai kearifan lokal, yaitu ‘teori orang basudara’, yang dibangun di atas nilai-nilai klutural atau pranata adatis yang berbasiskan agama dan dapat diuji oleh dunia. Seperti, misalnya, *pela*, *gandong*, *basudara*, *Salam-Sarane*, *masohi*, *makan patita*, *ale rasa beta rasa*, *ain ni ain*. Betapa tidak, menurut Tawaenella, menunjuk beberapa penulis asing kontemporer, misalnya, Paul Van Tongern, Cristina Jayane Montiel dan Noraini M, menulis tentang *BakuBae*. Di jelaskan, bahwa term *Baku*

⁵⁰ Abubakar Riry dan Pieter G. Manoppo, *Menantang Badai Menabur Damai; Napak Tilas Raja dan Latupatti Merajut Kembali Jaring Basudara*, (Jakarta: Insos Book, 2007), 237.

⁵¹ Ichsan Malik, “Wawancara”, tanggal 27 Februari 2020, di Bogor.

⁵² Jacky Manuputti, “*Hubungan Antar Agama di Maluku*”, dalam *Bincang Tentang Agama di Udara, Fundamentalisme, Pluralisme, dan Peran Publik Agama*, (Jakarta: Madia, 2005), 217-9.

⁵³ Hamdi Muluk dan Ichsan Malik, “*Peace Psychology of Grassroots Reconciliation, Lesson Learned from The “Baku Bae” Peace Movement*” dalam Christina Jayme Montiel dan Nuraini M. Noor, *Peace Psychology in Asia*, (New York: Spinger Science, 2009), 85, 91.

Bae ini merupakan ungkapan panggilan, dari kata ‘Baku’ yang berarti ‘ajakan, mengajak kepada seseorang yang dihormati’, disapa dengan ‘hati’ yang lemah-lembut, dicintai, disayang, atau ‘Tuan yang dihormati, Tuan hati jantung (saudara yang dituakan, tetap melekat dalam hati), walaupun beda keyakinan, untuk Bae, berbaik kembali, atau saling memaaf.⁵⁴

Pandangan Tawaenella di atas menunjukkan bahwa istilah *BakuBae* mengandung nilai-nilai kearifan budaya, nilai moralitas-religius. *BakuBae* yaitu sapaan, panggilan, atau mengajak orang lain untuk berbaik. Nilai-nilai ini merupakan transformasi ajaran teologi yang diyakini dan dipraktekkan “nenek dan tete moyang” orang Ambon-Maluku sejak ratusan tahun. *BakuBae* adalah penggabungan sesuatu yang tadinya dikotomis atau terbelah, kembali menjadi satu. Inilah hubungan yang mencerminkan keakraban, perdamaian, yang secara teologis dapat menghapus sekat-sekat permusuhan antara dorang (mereka) dengan torang (kita), tegas Tawaenella.

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa konsep *bottom-up* dalam teologi *BakuBae* menjadi bagian integral yang solutif bagi proses penghentian konflik. Sebaliknya, terdapat metode pendekatan resolusi konflik *top-down* sebagai mekanisme lain yang dilakukan oleh institusi negara TNI-Polri. Pendekatan *bottom-up* dapat mencairkan kekerasan konflik, karena lebih pada sentuhan psikologi dan kultural masyarakat sipil Salam dan Sarane, sebuah model resolusi konflik yang khas telah dikenal masyarakat di Ambon. Sejarah sosial konflik ini penting dicatat bahwa hubungan kedua agama di Ambon (Islam-Kriten) selalu membangun dirinya melalui kearifan kulturalnya, sebagai “agama-agama orang basudara” di dalam konteks kekerabatan yang khas. Fenomena dalam terminologi *BakuBae* itu benar-benar dihayati sebagai sebuah adiakarya para leluhurnya yang berwawasan “teologi kontekstual” yang mendasar sebagai kekuatan relegius-kultural, guna upaya mencegah, menghentikan, dan mentransformasikan konflik dengan daya jangkauan yang luas ke depan.

Nilai-Nilai Dasar Teologi *BakuBae* bagi *Peace Building*

Spirit dalam gerakan *BakuBae* adalah seperangkat nilai dasar yang bersumber dari ajaran teologi keagamaan, dan dijadikan acuan dalam proses penghentian kekerasan konflik di Ambon-Maluku. Nilai-nilai dasar ini ditemukan dalam proses sejarah perdebatan publik oleh masyarakat sipil moderat (cluster moderat), bukan dari mana-mana, atau dari siapa-siapa, bukan pula rekayasa Jakarta. Bersama tim fasilitator dan dewan pakar *BakuBae* sebagai narasumber kunci, kelompok masyarakat sipil moderat (*moderate civil society*) ini bekerja secara signifikan menjadi agen utama bagi pencegahan dan penghentian kekerasan konflik di Ambon. Konstruksi nilai-nilai dasar *BakuBae* yang dibangun berproses melalui perdebatan publik, lokar karya dan simposium translokal, sarasehan, atau kegiatan *workshop* translokal, sejak Juni 2000 di Ambon, dan beberapa kota lintas provinsi di Indonesia, internasional dalam waktu interaksi dan tempat yang berbeda selama tiga tahun gerakan *BakuBae*.⁵⁵

Hasil perdebatan publik dalam sejumlah lokakarya dan sarasehan yang berlangsung

⁵⁴ M. Noer Tawaenela, “Wawancara”, tanggal 17 Januari 2020, di Tulehu Ambo.

⁵⁵ Malik, *Mematahkan Kekerasan dengan Semangat BakuBae*, 34.

di dalam Gerakan *BakuBae* menghasilkan empat sistem nilai dasar sebagai temuan yang berbasis kepada spirit ajaran teologi *BakuBae*, atau bersumber dari ajaran keagamaan dan kearifan lokal, yang menjadi dasar kesepakatan bersama antara Islam dan Kristen di forum perdebatan Malino II. Keempat sistem atau unsur-unsur dasar dari nilai Teologi *BakuBae* adalah sebagai berikut.

Pemaafan (Forgiven)

Nilai dasar pertama adalah memaafkan (*forgiveness*). Belajar dari kesalahan merupakan nilai dasar pertama dalam spirit *BakuBae*. Nilai ini banyak menjadi diskursus dalam lokakarya *BakuBae*. Ini adalah kata yang agak mudah dicerna dalam pikiran, namun sulit diaplikasikan dalam konteks konflik Ambon. Sebab pelaksanaannya menuntut kejujuran dan keteladanan inklusif dan jiwa kepemimpinan, seperti yang telah ditunjukkan oleh Nelson Mandela, yang setelah satu periode menjadi presiden di Afrika Selatan, kemudian ia mundur dan pulang ke kampungnya untuk menjadi rakyat biasa. Bagi ajaran keagamaan (konteks Islam), pada dasarnya berkaitan dengan sejarah etika hidup dan akhlak Nabi Saw., sebagai bukti yang tak terbantahkan. Ketika Beliau dilempar dengan najis, dikejar dan diusir oleh oposisi Quraisy untuk keluar dari kota Mekkah, tanah tumpah darahnya yang disebut *ummi al-turab* atau tanah air yang dicintainya. Namun, gesekan sosial dan intimidasi dari kaum kafir oposisi itu direspon oleh Nabi Saw dengan sikap toleran, sikap ramah dan akhlak mulia, seraya mendoakan agar kaum kafir yang tersesat dalam kegelapan itu diberi hidayah oleh Allah Swt. Konteks ajaran teologi Islam mengenai unsur “pemaafan” yang dicontohkan oleh Nabi Saw melalui peristiwa bersejarah ini, dijelaskan didalam Q.S. al-Qashash [28] ayat 56.⁵⁶ Dalam konteks konflik di Ambon, baik agama Islam, Kristen, maupun pranata adat, merupakan fundamen dalam kerangka kehidupan masing-masing umat beragama untuk saling memaafkan, karena pemaaf adalah persoalan hati

Keadilan (Justice)

Nilai dasar kedua yang banyak menjadi perbincangan dalam lokakarya *BakuBae* adalah unsur keadilan (*justice*). Secara teoritis, menurut Malik, mengutip pandangan Aristoteles, kata “keadilan” ini dapat dimaknai sebagai keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif dimaksudkan dalam konteks kehidupan sosial. Unsur keadilan itu menjadi pemerataan bagi semua pihak telah memperoleh haknya sesuai dengan jumlah yang seimbang. Menurut keadilan distributive, adil jika seseorang memperoleh haknya sesuai dengan porsinya.⁵⁷ Jika kita menggabungkan dua model keadilan tersebut, maka konsep keadilan adalah sebagai berikut: Perlakuan adil terjadi apabila setiap orang telah memperoleh haknya yang sama, tapi harus proporsional dan didasarkan atas ketulusan hati.⁵⁸ Nah, di dalam penelitian ini, prinsip keadilan (*al-adalat*) merupakan nilai moral tertinggi pada manusia, berlaku untuk semua manusia dan merupakan kontrak sosial yang mengacu pada sistem dan upaya penegakan hukum. Namun, patut dicatat bahwa nilai dasar

⁵⁶ Innaka la> tahdi man ahbaba wa la> kinnalla>ha yahdiy> man yasya>`u wahua ‘almu bil muhtadi>n.” (Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk, (Q.S. al-Qashash [28] ayat 56).

⁵⁷ Malik, *BakuBae Gerakan dari Akar Rumput Untuk Penghentian Kekerasan* di Maluku, 2.

⁵⁸ Muchsin Qara’ati, *Lesson From Qur’an*, Terj. Yedi Kurniawan, *Al-Qur’an Menjawab Dilema Keadilan*, Cet. I (Jakarta: CV. Firdaus, 1991), 69.

keadilan ini tidak berhasil tuntas dipahami dan disepakati, apabila dialog macet. Maka kata-kata yang selalu muncul dalam berbagai kegiatan diskusi gerakan *BakuBae* adalah “yang penting mengungkap akar konflik di Ambon harus menjadi prioritas, dengan konsekuensi dilakukan penegakan hukum di atas moral dan kemanusiaan supaya adil, tandas Polpoke, Ketua Syuriah PW NU.”⁵⁹

Solidaritas (Solidarity)

Nilai dasar ketiga yang muncul ditemukan dari lokakarya *BakuBae* adalah solidaritas bagi kemusiaan dan sesama korban konflik. Konsep solidaritas berkaitan dengan usaha membangun kembali relasi sosial antara sesama komunitas Salam dan Sarane, seperti; masohi, pela, gandong, makan patita. Kultur solidaritas dekat dengan proses terciptanya hubungan kerjasama dan kolaborasi budaya yang bisa mengarahkan pada upaya penghentian konflik. Interaksi yang terjadi antara sesama aktivis *BakuBae* bersama komunitas sosial, berkisar pada diskusi yang berkembang seputar pemicu atau sebab konflik Ambon. Penyebab konflik awal yang terjadi pada hari H, tanggal 19 Januari 1999 atau bertepatan Hari Raya Idul Firi 1 syawal 1431 H. Diawali dengan perkelahian antara dua orang pemuda yang berbeda keyakinan, yaitu Muhammad Bugis (Islam) dan Yopi Saiya (Kristen). Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah di terminal Batu Merah, tepat pukul 13.30. Kejadian ini telah menimbulkan kepanikan massal, karena konflik pecah secara tiba-tiba bersifat sporadis, dan sulit dihentikan. Pembakaran tempat-tempat ibadah dan rumah-rumah warga semakin cenderung massif, sehingga kesulitan dibendung, kehancuran seluruh sistem sosial, dan aktifitas pemerintahan di kota Ambon menjadi lumpuh. Proses sejarah resolusi konflik tidak lepas dari peran utama gerakan *BakuBae*, yaitu bagaimana mencari cara untuk merakit kembali hubungan solidaritas dan kekerabatan, multikultural, kasih sayang, bagi “orang basudara” sebagai nilai-nilai kearifan lokal dan merupakan satu kesatuan yang strategi, tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat di Ambon Maluku.⁶⁰

Keragaman (Pluralism)

Nilai dasar keempat adalah kesadaran tentang adanya keragaman (pluralism) yang terdapat didalam masyarakat Ambon-Maluku. Pada tataran realitas, sejarah telah membentuk masyarakat Indonesia, khusus di Ambon-Maluku, sebagai masyarakat beragam. Sejak zaman tete dan nene moyang, zaman kedatangan Islam, Katolik yang dibawa oleh Portugis dan Protestan oleh Belanda dari bangsa Eropa, sampai proklamasi kemerdekaan, dan kebangkitan Republik Maluku Selatan (RMS) pada tahun 1945-1955, merupakan perjalanan sejarah yang membentuk manusia Maluku menjadi beragam dan unik.⁶¹ Dimensi ruang dan waktu kadangkala bagi masyarakat menjadi pendek, dengan merekam peristiwa sejarah zaman penjajah, seolah dirasakan seperti hari kemarin, padahal ada rentangan waktu ratusan tahun.

Melalui proses pergeseran dalam rentang waktu tersebut, maka pasti ditemukan

⁵⁹ K.H. Abdul Wahab Polpoke, mantan Ketua MUI Maluku 1998-2004, hasil “Wawancara”, dalam Tesis Burhanuddin Tidore, UIN Makassar, tanggal 26 Juli 2006, di Ambon.

⁶⁰ Karel Albert Ralahallu, *Berlayar Dalam Ombak. Berkarya Bagi Negeri; Pemikiran Anak Negeri Untuk Maluku*, Ct. I (Ambon: Ralahallu Institut, 2012), 11.

⁶¹ Rustam Kastor, *Suara Maluku Membantah Rustam Kastor Menjawab*, Cet. I (Yogyakarta: Wihdah Press, 1421 H/2000M), 80.

berbagai dinamika kehidupan sosial, pola pikir, atau karakteristik yang berbeda-beda. Dalam dimensi ruang, seolah-olah terjadi keterpisahan ruang antara Muslim dan Kristen, padahal secara sosial genealogi di Ambon berasal dari satu moyang, satu keturunan atau silsilah keluarga. Di sini tercermin prinsip dasar filosofi monodualistik (satu tapi dua, dua tapi satu) yang merupakan identitas kultural dan integritas sosial bagi kehidupan keagamaan dan sumber motivasi moral dalam strata hidup berbangsa maupun bernegara.⁶² Penelusuran tersebut akan menjadi pertimbangan bersama, bagaimana keragaman sosial bisa dikelola atau menjadi sumber kekuatan di masa yanag akan datang, dan kunci bagi penghentian konflik sosial bernuansa etnis dan politik, sehingga upaya konstruksi perdamaian di Indonesia, khusus di Ambon Maluku dapat segera terwujud.

Proses *BauBae* dalam pertemuan Malino II tidak terlepas dari peran tangan dingin Jusuf Kalla (JK) sebagai eksekutor dan tokoh di balik pencapaian kesepakatan perdamaian. Selain itu, JK merupakan salah satu tokoh perdamaian dunia, juru runding bagi Poso, damai di Malino dan Ambon Tenang. Pertemuan “segi tiga” di Malino II melibatkan tokoh lintas agama, antara Islam dan Kristen, serta Negara yang diwakili Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudoyono, yang menghasilkan sebelas (11) butir kesepakatan Malino bagi penghentian konflik di Ambon-Maluku.⁶³ Namun, fakta di lapangan pasca Malino justru muncul kelompok sosial oposisi yang menolak dan kelompok pro yang mendukung keputusan politik di Malino itu, sehingga menjadi hambatan pada tataran sosialisasi. Kelompok oposisi merasa dirugikan karena aspirasi untuk penegakan hukum dan mengusut peristiwa Idil Fitri berdarah atau konflik 19 Januari 1999 telah diabaikan oleh Negara. Delegasi Malino II dianggap tidak representatif, sehingga mendapat penolakan karena tidak diakui keabsahannya. Kelompok pro tetap konsisten mendukung program pemerintah untuk penghentian konflik Ambon, dan sosialisasi hasil Malino tetap berjalan, walaupun terdapat gesekan penolakan dari kalangan sipil umat Islam atau Laskar Jihad.

Realisasi program kampanye perdamaian (*BakuBae*) pasca Malino II melibatkan tokoh lintas agama dan elemen-elemen sosial moderat yang beragama, seperti tokoh agama, Raja- raja, Latupati, kelompok Pers, Grassroots. Mereka adalah instrumen penting bagi proses resolusi konflik yang berperan signifikan dan transformatif di dalam konstruksi *BakuBae* yang berbasis agama dan budaya. Makna dari teologi *BakuBae* adalah menegaskan inti dari ajaran keagamaan yaitu perdamaian, dialog interreligious, lintas budaya, dan membangun toleransi yang harmoni dan elegan.

Kesimpulan

Penelitian ini merupakan kajian teologi-kultural historis terhadap dinamika konflik sosial di Ambon yang menggunakan agama sebagai sebuah tindakan sosial pada aras kepentingan politik, sehingga kontradiktif dengan nilai-nilai dasar keagamaan dan nilai kearifan lokal (*BakuBae*). Berdasarkan eksplorasi dan penyajian data yang telah dituangkan dalam penelitian ini, penulis sampai pada beberapa kesimpulan dan temuan hasil penelitian sebagai berikut.

⁶² Watloly, *Maluku Baru Bangkitnya Mesin Eksistensi Anak Negeri*, 5.

⁶³ Farid Husain, *50 Pesan Kemanusiaan JK*, (Jakarta: Rayyana Komunkasindo, 2014), 74-75.

- Sejarah resolusi sosial konflik Ambon 1999-2002 memiliki dinamika dan sumber-sumber konflik yang *complicated* atau multidimensional, yang disebut sebagai krisis multi level. Konflik ini mencakup isu politik, ekonomi, sosial-budaya, hukum, polarisasi agama, dan bukan konflik agama. Wacana teologi *BakuBae* muncul sebagai sebuah kerangka dasar dari proses *making peace*, yaitu tindakan dalam mediasi, negosiasi, dan konsolidasi, dan *peace building* bagi penghentian kekerasan konflik menuju penghentian konflik model teologi *BakuBae*, yang dirumuskan atau dibangun di atas nilai-nilai agama dan budaya lokal bagi proses penyelesaian konflik.
- Spirit gerakan *BakuBae* dan nilai-nilai Teologi *BakuBae* dalam resolusi konflik Ambon adalah prinsip dasar dan integrasi nilai-nilai agama dan kearifan lokal berdampak signifikan. *Civil society*, seperti tokoh keagamaan, berperan dalam gerakan *BakuBae* resolusi sejarah perdebatan publik yang panjang, sejak Juni 2000 hingga Februari 2002. Kegiatan *BakuBae* melahirkan empat rumusan atau sistem nilai-nilai dasar teologi *BakuBae*, yang meliputi pemafaan (*forgiveness*), keadilan (*justice*), solidaritas (*solidarity*), keragaman (*pluralism*). Nilai-nilai dasar ini menjadi penguatan dalam konteks resolusi konflik model *peace building*. Kemudian dilaporkan kepada Presiden KH. Abdurrahman Wahid dan Menkokesra JK atau pihak Negara. Dengan patron “lebih cepat lebih baik”, JK segera bertindak untuk bergerak ke Ambon, sebagai proses awal menuju Bakudapa di Makassar I dan berunding di forum debat *BakuBae* Malino II Sulawesi Selatan pada tanggal 10-12 Februari 2002. Keputusan politik *top down* itu melahirkan 11 butir kesepakatan, namun menimbulkan kelompok sosial oposisi yang menolak dan pro hasil Malino II tetap menerima sosialisasi damai secara lebih permanen di Ambon Maluku.

Riset ini telah berusaha mengeksplorasi sejarah sosial konflik umat beragama di Ambon 1999- 2002, yang berlatar multidimensional. Proses resolusi konflik model negosiasi politik dari instrumen Negara bersifat *top-down* dan model *bottom-up* dari gerakan sosial *BakuBae* merupakan pendekatan yang berbasis pada konteks ajaran keagamaan dan kearifan lokal menjadi penting sebagai implementasi. Pilihan tema “resolusi” lebih didasarkan pada pertimbangan agar potret dan isu-isu kemanusiaan dalam relasi konflik sosial antaretnik di Ambon tidak mengalami kebututan dalam penyelesaian. Namun segera dapat dihentikan berlandaskan sinergitas antara inti ajaran agama, aspek budaya menjadi titik temu konvergensi dan kebijakan politik negara bagi pemulihan keamanan. Dalam merespons isu-isu konflik dan kasus kekerasan sosial-struktural yang destruktif, maka filsafat perdamaian sebagai ajaran teologi agama-agama di dalam mengubah budaya kekerasan itu menjadi dasar metodologi “resolusi” konflik, yang berbasis religius-cultural dan kunci bagi konstruksi damai menyeluruh.

Diharapkan bahwa cara dan pendekatan koordinatif, keterpaduan, komitmen, niat baik, dan melibatkan komponen sosial, tokoh agama, tokoh adat, merespons aspirasi suara akar rumput (*grassroots*) yang bersentuhan langsung atau terkait dengan konflik, dapat menjadi satu rangkaian konvergensi bagi penyelesaian konflik secara utuh. Sebaliknya konsep *BakuBae* dalam penelitian ini dapat menjadi sebuah landasan terminologi resolusi konflik sebagai teori-baru yang penulis sebut dengan “teologi-budaya, atau teologi orang

basudara antara orang Salam dan Sarane” yang telah diuji oleh dunia akademi. Dapat dibuktikan bagaimana proses integrasi sosial berbasis agama dan budaya menjadi titik berangkat (*common platform*) bagi resolusi konflik dalam forum perdebatan publik di Malino II, model teori Habermas. Teori ini sejalan dengan konsep Paul Van Tongern mengenai *dialog spices paeace; BakuBae in Indonesia*, teologi kerukunan perspektif Azra, Ichsan Malik, dan Faucault mengenai wacana kuasa dan pengetahuan bagi tegaknya keadilan.

Penelitian ini menemukan juga bahwa konsep teologi *BakuBae* yang digali dari nilai-nilai ajaran keagamaan secara normatif, atau nilai-nilai agama berbasis *local wisdom*, menjadi titik temu (*convergency*) bagi proses pertemuan “segi tiga” antara Muslim dan Kristen bersama pemerintah/Negara dalam debat politik di Malino Sulawesi Selatan, menjadi indikator sejarah resolusi konflik di Indonesia. Skala konflik religio-komunal di Ambon berhasil direduksi pemerintah secara *top down*, bertujuan membangun interaksi intern umat beragama dan antarumat bergama, yang tidak hanya dapat berkoeksistensi secara harmonis dan damai melalui pendekatan religius- kultural, tetapi juga bersedia aktif dan proaktif dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama sosial berlandaskan etika kemanusiaan dalam iklim kebhinnekaan. Teologi *BakuBae* juga menjadi jembatan perdamaian bagi resolusi konflik Ambon. Implementasi *BakuBae* merupakan spirit kebangsaan sebagai perekat persatuan dan pembangunan secara konprehensif.

Gerakan *BakuBae* dapat menjadi mekanisme lokal dalam proses perdamaian bagi ke dua komunitas Salam dan Sarane di Ambon untuk menatap masa depan dalam konteks membangun basis kehidupan dan kekerabatan, meski berbeda agama. Pola hidup yang dilandasi atas nilai-nilai ajaran agama dan kearifan budaya dapat berintegrasi menjadi penguatan sebagai kerangka umum sistem lokal yang melekat pada pola hidup “orang basudara”, inklusivisme, toleran, pluralitas, gotong-royong (*masohi*). Model pendekatan sejarah gerakan *BakuBae* yang berbasis pada sistim nilai-nilai dasar ajaran teologi, menjadi perekat sebagai pranata adat yang khas dan benteng pertahanan bagi hubungan lintas sosial basudara Salam dan Sarane di Ambon. Sehingga harapan normatif Islam dan etos kerja “gerakan Babubae” dapat bersinergi dengan keinginan *civil society* dan pertarungan kuasa atau kebijakan politik Negara di forum perdebatan Malinom II. Inilah menurut JK, bertindak cepat dalam menjalankan amanat pemerintahnya, merupakan landasan bagi proses penyelesaian konflik sosial di Ambon menjadi tesis konvergensi terbukti.

Daftar Pustaka

- Al-Haitamiy, Al-Hafiz Nur al-Di>n Ali Ibn Ba>r, Majmu’ al-Zawa>id Wa Manba’ul Fawa>’id, Vol. 8.,Beirut: Da>r Al-Fikr, 1412 H/1992
- Al-Qurthubi>, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansho>ri. al-Ja>mi’ li> Ahka>m al-Qur’a>n,
- Jilid III . Beirut: Dār al-Fikr, 1993
- Alatas, Syed Farid. Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial Asia, Tanggapan Terhadap Eusentrisme. terj. Ali Noer Zaman. Jakarta: Mizan Publika, 2010

- Azra, Azyumardi, Konteks Berteologi di Indonesia Pengalaman Islam. Jakarta: Paramadina, 1999
- Histografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas dan Aktor Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Bakhof, Louis, Systematic Theology, United States of America: WM.B Eermands Publishing Co, 1981
- Bohm, C.J, Beref of The Unrets in The Maluccas 1999-2003. Ambon: Crisis Center Diocese of Amboina, 2003
- Burhanuddin, Nunung. “Teologi Sosial: Reaktualisasi Nilai-nilai Kultural Menuju Transformasi Masyarakat” dalam Indo-Islamic Jurnal International of Islamic Science. Volume 4, Number 1, 2007 M/1428 H
- Durkheim, Emile, The Elementary Form of Religious Life, New York: Free Press, 1992
- Engineer, Ashgar Ali Mahendra, eds., “Sources Of Nonviolence in Islam”, Nonviolence Contemporary Issues and Challenges, New Delhi: Gandhi Peace Foundation, 1994.
- Engineer, Asghar Ali. Islam dan Teologi Pembebasan. terj. Agung Prihanoro, dengan judul, , Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Fatwa, Ach. Fachruddin, dalam Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 11, No. 1, STAIN Ponorogo, Mei 2011
- Fisher, Simon et.al., Working With Conflict: Skill and Strategies for Action, New York-USA: Zed Books Ltd, 2000
- Halim, Abdul (edt.) Teologi Islam Rasional, Apresiasi Terhadap Wacana dan Praksis, Harun Nasution. Jakarta: Ciputat Pers, 2001.
- Hamilton, Peter, Talcolt Parsons dan Pemikirannya, terj. Hartono. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990
- Hornby, A.S, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Walton Street: Oxford University, 1987.
- Jamil, Mukhsin, Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik, Semarang: Walisongo Mediate Centre, 2007
- Jeong, Ho-Won, Peace and Conflict Studies: An Introduction, England: Ashgate Publishing Company, 2003.
- Judy, Carter & Smith, Gordon. Religious Peacebuilding: From Potensial to Action.
- Kastor, Rustam, Suara Maluku Membantah Rustam Kastor Menjawab, Cet. I. Yogyakarta: Wihdah Press, 1421 H/2000M.
- Kim, Yun & Gudykunst, Communicating with Stranger An Approach to Interpersonal Communication, McGraw Hill: Sage Publication, 1997.
- Klinken, Gerry Van, Communal Violence and Democratization in Indonesia:, Small Town Wars. Terj. Bernard Hidayat dengan judul Perang Kota Kecil Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia. Jakarta: Obor Indonesia, 2007.
- Kornblum, William, Sociology in The Changing World, 6 th. EDT. USA: Wardsmoth/Thompson Learning, 2003.
- Lederach, John Paul Building, Peace Sustainable Reconciliation in Divided Societies. Washington: United State Institute of Peace Studie, 1998.
- Lederach, John Paul, “A Framework for Building Peace” dalam Preparing for Peace Conflict Transformation Across Culture, New York: Syracuse University Press, 1995.

- Lev, Daniel S, *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*. The Hague,: Kluwer Law International, 2000.
- Levine, Stewart, *Getting To Resolution: Turning Conflict Into Collaboration*, San Fransisco: Beret Koehler Publisher Inc. 1988
- Liliwari, Alo Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Malik, Ichsan, *BakuBae Gerakan dari Akar Rumput Untuk Penghentian Kekerasan Konflik di Maluku*, Jakarta: Tifa Foundation dan Yayasan Kumala, 2001.
- Manuputty, Jacky, “Hubungan Antar Agama di Maluku”, dalam *Bincang Tentang Agama di Udara, Fundamentalisme, Pluralisme, dan Peran Publik Agama*. Jakarta: Madia, 2005.
- Marathon, Deuth & Coleman P.T, *The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice*, San Fransisco: John Wiley & Sons Inc. 2002.
- Marx, Karl & Engels, Frederick, *Manifesto of The Communist Party*, dalam . Diakses tanggal 24 Desember 2018.
- Maswardi, Rauf *Konsensus dan Konflik Politik*, Jakarta: PT. Grasindo, 2011. Mazkur, Salam *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya, Bina Ilmu, 1993.
- Miill, Hugh. at.all., *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Monyelesaikan, Mencegah, Menglola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, Terj. Tri Budhi Sastrio. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mujib, Ibnu & Rumahuru, Yance Z, *Paradigma Transformatif Masyarakat Dialog Membangun Fondasi Dialog Agama-Agama Berbasis Teologi Humanis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Nimer, Abu, *Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Pusakan Alvabeth, 2010.
- Nugroho, Prajarto Dirjosanjoto F. & Kana, Niko L, *Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Pohl, Florian, “Integregious Harmony and Peacebuilding in Indonesia” dalam Christina Jayme Montiel, Noraini M. Noor, ed., *Peace Psychology in Asia*, New York USA: Springer Library of Congress, 2009
- Priut G. Dean & Kim, Sung Hee *Social Conflict: Escalate, Stalemate, and Settlement*. 3rd Edition, New York: McGraw-Hill, 2004.
- Qara’ati, Muchsin. Lesson From Qur’an, terj. oleh Yedi Kurniawan, dengan judul *Al-Qur’an Menjawab Dilema Keadilan*, Cet. I. Jakarta: CV. Firdaus, 1991.
- Quarrie, Donald Mc, *Reading in Contemporary Sociological Theory From Modernity to Post- Modernity*, New Jersey: Prentice-Hall, 1995.
- Ralahallu, Karel Albert, *Berlayar Dalam Ombak Berkarya Bagi Negeri Pemikiran Anak Negeri Untuk Maluku*, Ambon-Maluku: Ralahalu Institut, 2012
- Riry, Abubakar & Manoppo, Pieter G, *Menantang Badai Menabur Damai; Napak Tilas Raja dan Latupatti Merajut Kembali Jaring Basudara*, Jakarta: Insos Book, 2007
- Rizal, Toha Rudin, “Gambaran Konflik Bermatras Agama di Indonesia: Problem Solving Berbasis Teologi Transformatif,” *Jurnal Studi Keislaman el-Hekam*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016.

- Sachedian, Abdulaziz, *Beda tapi Setara Pandangan Islam Tentang Non-Islam*, Terj. Satrio Wahono dengan judul Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 1425 H/2004.
- Saifuddin, Ahmad & Rohman, Fathur“Teologi Agama Islam, Hindu, dan Kristen di Jepara”, dalam
Jurnal Al-Qalam, Volume 25, Nomor 2, Desember 2019.
- Sheed's, *Democratic Theology*. United States of America: Thomas Nelson Publisher, 1980.
- Sya'bān, Abdul Husein, *Fiqh al-Tasāwuf al-Fikr al-Arabī al-‘Islāmī*, Beirut: Dār al-Nahr, 2005.
- Taufiqurrohmān S, “Konsep Perdamaian dalam al-Qur’an,” Artikel dari <http://bdkpalembang.kemenag.go.id/konsep-perdamaian-dalam-al-qur'an>. Diakses tanggal 30 Desember 2019
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tongeren, Paul Van. & Brenk, Malink. “Dialog Spices Peace: BakuBae In Indonesia”, dalam
People Building Peace II Successful Stories of Civil Society. Colorado USA: Lynne Rienner Publishers, Inc., 2005.
- Waardenburg, Jean Jacques *Muslim Christian Preseption of Dialogue Today Experiences and Expectation*, Paris: Library of Cataloging Press, 1998.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.